KOTA MADIUN

DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKJ TAHUN 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MADIUN
Kota Pendekar

Dindik SIGAP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terdapat delapan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 115,57 persen atau masuk dalam kategori diatas espektasi. Dari ketujuh indikator sebanyak enam indikator masuk kedalam kriteria diatas ekspektasi karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen. Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp. 267.451.372.090,- dengan penyerapan sebesar Rp. 226.513.364.734,- atau 84,69 persen. Anggaran tersebut terdiri atas anggaran rutin sebesar Rp. 195.364.661.871,- dengan penyerapan sebesar Rp. 159.172.245.033,- atau 81,47 persen dan anggaran bidang sebesar Rp. 72.086.710.219,- dengan penyerapan sebesar Rp. 67.341.119.701,- atau 93,42 persen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, transparan, dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota Madiun serta dalam rangka perwujudan *good governance,* Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menyusun dan merumuskan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah direncanakan dan dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan. Penyusunan laporan ini juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di Kota Madiun. Dari LKJ ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di masa mendatang khususnya untuk penyempurnaan program kegiatan di bidang pendidikan.

Masukan dan saran membangun dari semua *stake holder* pendidikan dan pemerhati pendidikan tentu saja sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Madiun, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Madiun

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

LISMAWATI, SPd, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199403 2 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

B A B I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan Penyusunan LKJ 3

1.4 Gambaran Umum Dinas Pendidikan 3

1.4.1 Struktur Organisasi 4

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi 6

B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 7

2.1.1 Tujuan 7

2.1.2 Sasaran 7

2.2 Rencana Kinerja 8

2.2.1 Sasaran dan Indikator sasaran 8

2.2.2 Program 9

2.2.3 Kegiatan 9

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja 14

3.1.1 Sasaran "Meningkatnya Tata Kelola…" 15

3.1.2 Sasaran "Meningkatnya Efektifitas Hasil…" 19

3.1.3 Sasaran "Meningkatnya Implementasi…"..... 22

3.1.4 Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Lembaga.."… 26

3.1.5 Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Pembiayaan." 29

3.1.4 Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik." 32

3.1.4 Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Sarana…..."… 35

3.2. Realisasi Anggaran 38

B A B IV PENUTUP 42

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governence*, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi.

LKJ adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk dikonfirmasi dalam LKJ adalah yang mencakup capaian kinerja setahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pendidikan Kota Madiun Tahun 2022 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. SE Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 - 2030;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.
15. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
17. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Dokumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kota Madiun.

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Renstra.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Madiun.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikuitnya.
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dinas Pendidikan selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab penuh kepada Walikota Madiun melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

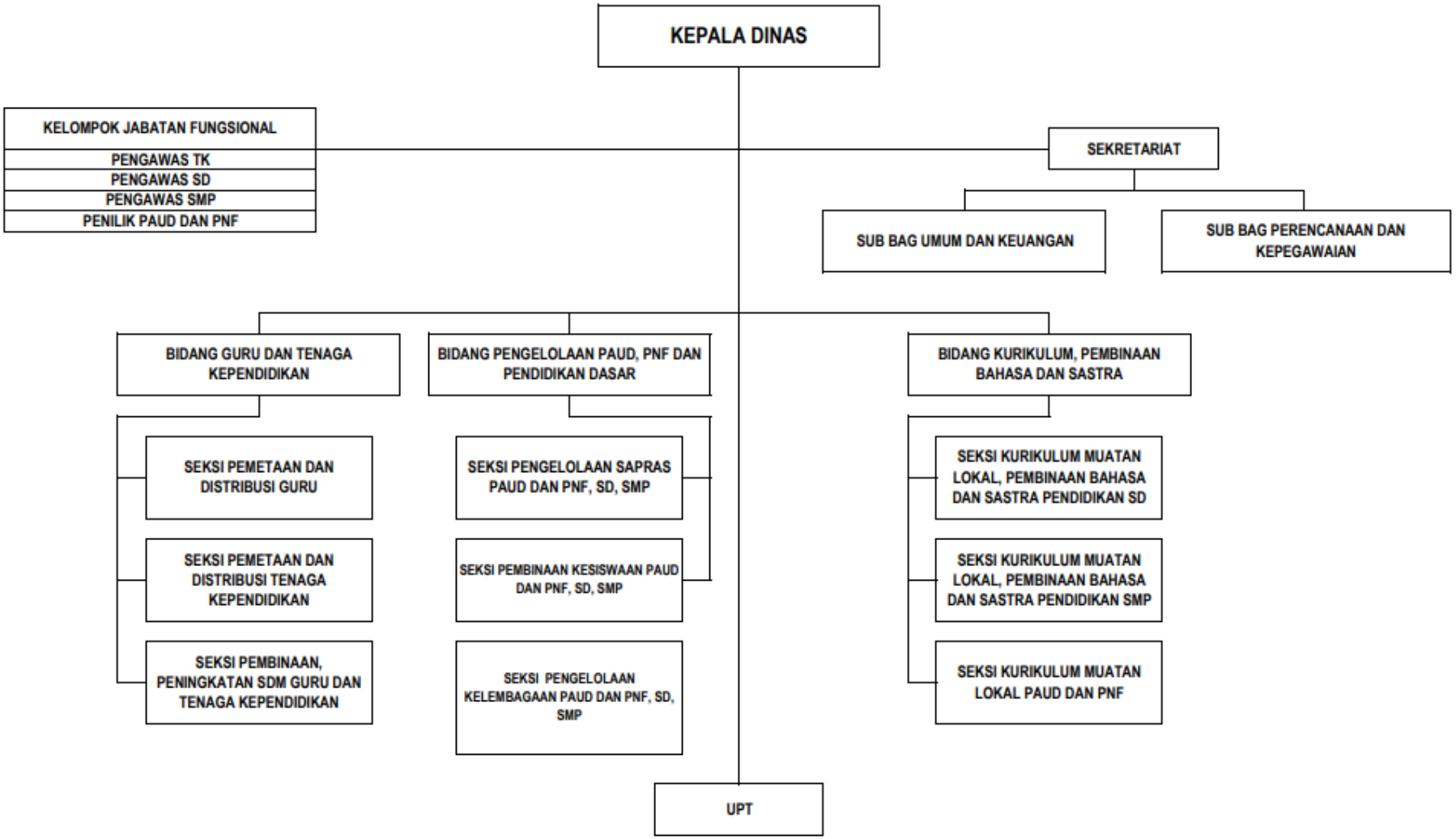

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Disebutkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dimana Tugas Pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
d. pelaksanaan pembinaan di Sekolah ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN

Untuk mewujudkan tercapainya pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Madiun telah melaksanakan beberapa rencana pengembangan pendidikan baik rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Nasional (RPPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2019-2024), Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan dokumen lain yang terkait seperti Rencana Kerja.

2.2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan

Keterkaitan Dinas Pendidikan dengan RPJMD tahun 2019-2024 adalah bahwa sesuai dengan Misi Walikota Dinas Pendidikan ada pada misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kualitas masyarakat Kota Madiun dengan tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik.

2.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator :

1. Rata-rata lama sekolah
2. Harapan Lama sekolah

2.2.2 Rencana Kinerja

2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran yang akan di capai Dinas Pendidikan sesuai dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan Kota Madiun	10.10
2.	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	Jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	3.290
3.	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100%
5.	Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%
6.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	65%
7.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	100%

2.2.2 Program

Dinas pendidikan mempunyai 4 (empat) program guna mencapai sasaran rencana kinerja. Adapun program dan jumlah anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	195.364.661.871
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	67.486.374.349
3.	Program Pengembang Kurikulum	3.176.536.300
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.423.799.570
	Jumlah	267.451.372.090

2.2.3 Kegiatan

Dinas Pendidikan mempunyai 11 (sebelas) kegiatan guna mencapai sasaran rencana kinerja. Adapun kegiatan dan jumlah anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.899.264.500
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.474.029.871
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.256.332.000
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.035.500
5.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.999.037.638

6.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.495.025.096
7.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.514.701.865
8.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	477.609.750
9.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.639.755.582
10.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	536.780.718
11.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.423.799.570
	Jumlah	267.451.372.090

B A B III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENDIDIKAN

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran dan analisi capaian kinerja menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Metode Menyimpulkan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO.	KRITERIA PENGUKURAN	PREDIKAT
1	91% ≤ 100 %	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

c. Mengukur Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Efisiensi anggaran = % Capaian Kinerja - % Capaian Keuangan

Pada Tahun 2022, capaian kinerja dan penggunaan anggaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan Kota Madiun	10.10	14.93	148%
2.	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	Jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	3.290	4.971	151%
3.	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan	Persentase	100%	100%	100%

	lembaga pendidikan sesuai standart nasional	sekolah yang memenuhi SNP			
5.	Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	65%	68%	105%
7.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	100%	105.48%	105.48%

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. **Sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah"**

   Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari perdoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

   Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan	10.10	14.93	148%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini menujukkan telah mencapai target untuk indeks RB Dinas Pendidikan dengan predikat sangat tinggi.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 : Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan	5.75	14.93	260%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya terlihat adanya peningkatan dari 5.75 menjadi 14.93 (naik sebesar 9.18)

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra tahun 2019-2024.

Tabel 3.5. : Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra dalam Perjanjian pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah perangkat daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target akhir periode
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan	14.93	18.10

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 mendekati dari target akhir periode sehingga capaian harus ditingkatkan agar tercapai target akhir dari renstra dan capaian harus melebihi dari target.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Adanya tim reformasi birokrasi dan agen perubahan di Dinas Pendidikan.
2. Adanya dukungan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kota.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Belum rutinnya dilaksanakan sosialisasi rencana kerja reformasi birokrasi (RB)
2. Belum optimalnya komitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
3. Belum maksimalnya pemantauan internal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
4. Kurangnya koordinasi dengan bidang dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI)

5. Belum semua ASN melaporkan LHKPN dan LKHASN dalam aplikasi SIHARKA

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melaksanakan secara rutin sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB)
2. Memberikan sosiasilisasi dan motivasi Reformasi Birokrasi (RB) sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan.
3. Penanggung jawab RB melaksanakan rencana kerja secara rutin.
4. Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang secara rutin
5. Mendorong semua ASN untuk melakukan pelaporan.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 195.364.661.871 dengan serapan sebesar Rp. 159.172.245.033. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 81%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	148%	81%	67%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah" mencapai 67%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

2. Sasaran **"Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi"**

Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (*ICT Literacy*), dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kemenarikan proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini dapat menciptakan berbagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.7. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	3.290	4.971	151%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini menunjukkan telah mencapai target untuk siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standart. Capaian kinerja mencapai 151% dengan predikat sangat tinggi.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.8. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	-	4.971	-

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran meningkatnya efektifitas hasil proses belaar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi baru ada di tahun 2022, sehingga realisasi untuk tahun 2021 belum ada

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024.

Tabel 3.9. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan target akhir periode pada sasaran Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	4.971	3.290

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah melebihi dari target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja yaitu:

1. Minat bakat, kecerdasan dan motivasi dari peserta didik
2. Tersedianya sarpras khususnya laptop yang mendukung dalam pembelajaran berbasis teknologi
3. Tersedianya media pembelajaran berbasis teknologi
4. Tersedianya jaringan internet dan wifi yang memadahi.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Potensi peserta didik yang berbeda beda
2. kurang terpeliharanya dengan baik sarpras khususnya laptop

Rencana Tindak Lanjut:

1. memberikan motivasi pembelajaran kepada semua peserta didik.
2. Memberikan sosialisasi kepada peserta didik khususnya yang dipinjami laptop untuk lebih memelihara laptop dengan baik.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 67.486.374.349 dengan serapan sebesar Rp. 63.076.915.373. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 93%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	151%	93%	58%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi" mencapai 58%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

3. Sasaran **"Meningkatnya Implementasi Kurikulum di Sekolah"**

   Hasil dari implementasi kurikulum di sekolah adalah kemampuan literasi yang merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Penentuan target dari sasaran ini adalah rata-rata nasional. Hasil implementasi kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut:

   a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

      Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2022. Pencapaian indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.11. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah, realisasi tahun 2022 telah melebihi target. Hasil dari implementasi kurikulum di sekolah adalah kemampuan literasi yang merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Penentuan target ini adalah rata-rata nasional. Dimana rata-rata nasional dari kemampuan literasi ini adalah 1.69. sedangkan capaian kinerja dari Dinas Pendidikan Kota Madiun mencapai 2.08. Sehingga capaian kinerja dari sasaran ini telah melebihi dari target yaitu rata-rata nasional. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.12. : Perbandingan capaian kinerja ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	85%	100%	118%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya terlihat adanya peningkatan dari 85% menjadi 100%. Capaian kinerja meningkat sebesar 118%

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024

Tabel 3.13. : Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode pada sasaran Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Pendidikan Nomor 9 Tahun 2019
2. Adanya peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan literasi sekolah melalui dongeng pagi hari di setiap satuan pendidikan.
3. Program *Smart City* Pemerintah Kota Madiun dalam mendukung literasi Digital dalam penerapan pembelajaran di era 4.0 dan 5.0
4. Adanya pembiasaan di satuan pendidikan tentang literasi budaya melalui 1 hari berbahasa jawa dan Jum'at religi.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan pendidikan di sekolah oleh guru dengan tindak lanjut pendidikan karakter selama di rumah dan masyarakat.
2. Belum maksimalnya peran serta dunia usaha dan industri dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Menumbuhkan pembudayaan literasi dan numerasi di satuan pendidikan secara serentak melalui program pendikar sakti (pendidikan karakter dengan 1 karya prestasi)
2. Meningkatkan sinergi peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter siswa di rumah
3. Membangun jenjang/relasi dengan dunia usaha/industri dalam menjamin kualitas pendidikan di Kota Madiun

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pengembangan Kurikulum. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 3.176.536.300 dengan serapan sebesar Rp. 2.921.525.128. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 91%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	100%	91%	9%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah" mencapai 9%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

4. Sasaran **"Meningkatnya Pengelolaan Lembaga Pendidikan sesuai Standart Nasional"**

Hasil dari pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional adalah kemampuan numerasi yang merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Penentuan target dari sasaran ini adalah rata-rata nasional. Hasil implementasi kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.15. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pengelolaan lembaga pendidikan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional, realisasi tahun 2022 telah melebihi target. Hasil dari pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional adalah kemampuan numerasi yang merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Penentuan target ini adalah rata-rata nasional. Dimana rata-rata nasional dari kemampuan nemurasi ini adalah 1.60. Sedangkan capaian kinerja dari Dinas Pendidikan Kota

Madiun mencapai 1.83. Sehingga capaian kinerja dari sasaran ini telah melebihi dari target yaitu rata-rata nasional dengan predikat sangat tinggi.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.16. : Perbandingan capaian kinerja ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pengelolaan lembaga pendidikan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	85%	100%	118%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya terlihat adanya peningkatan dari 85% menjadi 100%. Capaian kinerja menunjukkan 118%

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024

Tabel 3.17. : Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode pada sasaran Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya Pengelolaan lembaga pendidikan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100%	100%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Pendidikan Nomor 9 Tahun 2019
2. Adanya peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan literasi sekolah melalui dongeng pagi hari di setiap satuan pendidikan.
3. Program smart city pemerintah kota Madiun dalam mendukung literasi Digital dalam penerapan pembelajaran di era 4.0 dan 5.0
4. Adanya pembiasaan di satuan pendidikan tentang literasi budaya melalui 1 hari berbahasa jawa dan jum'at religi.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan pendidikan di sekolah oleh guru dengan tindak lanjut pendidikan karakter selama di rumah dan masyarakat.
2. Belum maksimalnya peran serta dunia usaha dan industri dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Menumbuhkan pembudayaan literasi dan numerasi di satuan pendidikan secara serentak melalui prgram pendikar sakti (pendidikan karakter dengan 1 karya prestasi)
2. Meningkatkan sinergi peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter siswa di rumah
3. Membangun jenjang/relasi dengan dunia usaha/industri dalam menjamin kualitas pendidikan di Kota Madiun

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan lembaga pendidikan sesuai Standart Nasional" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pengembangan Kurikulum. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 3.176.536.300 dengan serapan sebesar Rp.

2.921.525.128. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 91%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standar nasional

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengelolaan lembaga pendidikan sesuai Standart Nasional	100%	91%	9%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah" mencapai 9%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

5. Sasaran **"Meningkatnya Pengelolaan Pembiayaan sesuai Standart Nasional"**

   Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.19. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pengelolaan pembiayaan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional ini menunjukkan telah mencapai target dengan predikat sangat tinggi. Target dari sasaran ini adalah jumlah sekolah yang pembiayaannya terpenuhi.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.20. : Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pengelolaan pembiayaan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	-	100%	-

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional baru ada di tahun 2022, sehingga realisasi untuk tahun 2021 belum ada.

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024

Tabel 3.21. : Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan akhir periode pada sasaran Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya Pengelolaan pembiayaan sesuai Standart Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	100%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai dari target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Adanya pembiayaan sekolah yang berasal dari dana APBD maupun APBN.
2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan melibatkan semua pihak sekolah.
3. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dengan menggunakan IT seperti penyusunan RKA Sekolah dari dana APBD dan BOS menggunakan SIPD dan ARKAS

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kurangnya SDM di sekolah dalam penyusunan perencanaan melalui IT
2. Penyusunan pembiayaan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas di sekolah
3. Pencairan pembiayaan sekolah dari pusat sering kali terlambat

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mengadakan pelatihan penyusunan perencanaan melalui aplikasi
2. Mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah
3. Koordinasi dengan pusat dan penyampaian laporan tepat waktu.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 67.486.374.349 dengan serapan sebesar Rp. 63.076.915.373. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 93%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesua standart nasional

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengelolaan pembiayaan sesuai Standart Nasional	100%	93%	7%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya pengelolaan pembiayaan sesuai standart nasional" mencapai 7%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

6. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik"**

Sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga pendidik" keberhasilan capaian sasaran diukur dengan beberapa indikator sebagaimana tabel berikut ini:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.23. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	65%	68%	105%

Penghitungan persentase guru, kepala sekolah dan pengawas berkompetensi berdasarkan jumlah guru yang bersertifikasi dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan.

Target Persentase guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Berkompetensi target di tahun 2022 adalah 65%. Sedangkan untuk realisasi persentase guru, Kepala sekolah, dan Pengawas berkompetensi di tahun 2022 adalah 68%. Capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas tenaga pendidikan sebesar 105%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.24. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	65%	68%	105%

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran meningkatnya kualitas tenaga pendidikan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya terlihat adanya peningkatan dari 65% menjadi 68%. Capaian kinerja menunjukkan 105%.

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra tahun 2019-2024

Tabel 3.25. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan akhir periode pada sasaran Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	68%	68%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai dari target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga profesional melalui sertifikasi bagi guru yang telah diangkat namun belum memiliki sertifikat pendidik.
2. Tingginya minat para guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Terbatasnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama.
2. Masih terdapat guru yang tidak lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3. Beberapa guru belum memenuhi syarat masa kerja untuk mengikuti seleksi administrasi

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mengusulkan tambahan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.423.799.570

dengan serapan sebesar Rp. 1.342.679.200. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 94%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas tenaga pendidikan

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	105%	94%	11%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan" mencapai 11%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

7. Sasaran **"Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional"**
   a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.27. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	100%	105.48%	105.48%

Nilai APM Kota Madiun sebesar 105.48%. Adapun penghitungan APM ini berdasarkan jumlah peserta didik usia sekolah (5 – 15 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Madiun (5 – 15 tahun)

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.28. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu pada sasaran Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	120.26%	105,48%	87,71%

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024

Tabel 3.29. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan akhir periode pada sasaran Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Periode
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	105,48%	100%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir periode terlihat capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai dari target akhir periode.

d. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kesadaran masyarakat Kota Madiun mengenyam pendidikan meningkat.
2. Sarana dan prasarana pembelajaran yang nyaman dan memadai
3. Adanya program inklusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Anak putus sekolah karena faktor sosial di keluarga dan masyarakat seperti keluarga yang bermasalah.
2. Adanya anak berkebutuhan khusus.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mengusulkan tambahan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran "Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional" di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 67.486.374.349 dengan serapan sebesar Rp. 63.076.915.373. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 93%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart nasional" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	105.48%	93%	12.48%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan" mencapai 12.48%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 84% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,69%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada program pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 94%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi %
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan Kota Madiun	10.10	14.93	148%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab	195.364.661.871	159.172.245.033	81%
2	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	Jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	3.290	4.971	151%	Program Pengelolaan Pendidikan	67.486.374.349	63.076.915.373	93%
						Program Pengembangan Kurikulum	3.176.536.300	2.921.525.128	91%
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.423.799.570	1.342.679.200	94%
	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%	Program Pengembangan Kurikulum	3.176.536.300	2.921.525.128	91%
	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	67.486.374.349	63.076.915.373	93%
	Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	67.486.374.349	63.076.915.373	93%
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	65%	68%	105%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.423.799.570	1.342.679.200	94%
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	100%	94.16 %	105.48%	Program Pengelolaan Pendidikan	67.486.374.349	63.076.915.373	93%

Analisis Efisiensi

No.	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	Program	Realisasi %	Efisiensi %
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Dinas Pendidikan Kota Madiun	148%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab	81%	67%
2	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	Jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	151%	Program Pengelolaan Pendidikan	93%	58%
				Program Pengembangan Kurikulum	91%	60%
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94%	57%
	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	Program Pengembangan Kurikulum	91%	9%
	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	93%	7%
	Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	93%	7%
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	105%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94%	11%
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	APM Paud, SD, dan SMP	105.48%	Program Pengelolaan Pendidikan	93%	12,48%

Realisasi anggaran dalam program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	**195.364.661.871**	**159.172.245.033**	**81%**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.899.264.500	7.684.250.400	86%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.474.029.871	146.745.464.706	81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.256.332.000	4.091.524.189	96%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.035.500	651.005.738	89%
Program Pengelolaan Pendidikan	**67.486.374.349**	**63.076.915.373**	**93%**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.999.037.638	29.104.305.790	94%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.495.025.096	26.257.496.173	92%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	7.514.701.865	7.230.743.410	96%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	477.609.750	484.370.000	101%
Program Pengembangan Kurikulum	**3.176.536.300**	**2.921.525.128**	**91%**
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.639.755.582	2.443.812.247	93%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	536.780.718	477.712.881	89%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**1.423.799.570**	**1.342.679.200**	**94%**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.423.799.570	1.342.679.200	94,30%
Jumlah	**267.451.372.090**	**226.513.36.734**	**84%**

B A B I V
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2022 merupakan gambaran yang memuat tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran visi misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tahun anggaran 2022 akan menjadi pijakan dalam merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Dari hasil penyusunan laporan kinerja tahun 2022 di atas menunjukkan bahwa sebagian capaian realisasi sesuai dan bahkan ada yang di atas target yang telah ditetapkan walaupun masih ada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja dan serta memenuhi target kinerja, Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya sebagaimana berikut ini:

- Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal.
- meningkatnya kualitas standar proses pembelajaran
- Melaksanakan peningkatan kualitas SDM yaitu menyelenggarakan Bimtek, Pelatihan dan Workshop.
- Meningkatkan sarana prasarana untuk pembelajaran yang lebih optimal.
- Mengusulkan anggaran yang cukup agar target indikator tercapai.
- Melakukan inovasi inovasi baru dalam pencapaian target

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan, Kota Madiun ini dibuat sebagai wujud dari transparansi pelaksanaan kinerja pada bidang pendidikan. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk melangkah lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

POHON KINERJA

PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (IPM)

Urusan Pendidikan

TERWUJUDNYA KUALITAS PENDIDIKAN YANG BERSTANDAR NASIONAL DAN BERKELANJUTAN BERBASIS TEKNOLOGI

- Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi
  Ik: persentase siswa yang memenuhi passing grade
  - Meningkatnya kelancaran proses belajar mengajar di sekolah
    Ik: persentase sekolah dalam kelancaran proses belajar mengajar di sekolah
    - Terpenuhinya kebutuhan TIK dalam proses mengajar (pinjam pakai laptop)
      Ik: Jumlah siswa yang pinjam pakai laptop
    - Terpenuhinya kebutuhan seragam siswa (pemberian seragam gratis)
      Ik: Jumlah siswa yang menerima seragam
  - Meningkatnya kualitas proses pembelajaran
    Ik: persentase sekolah yang memenuhi standart minimal proses belajar mengajar
    - Terlaksananya pengawasan pelaksanaan proses belajar mengajar
      Ik: Jumlah lembaga dalam pengawasan
  - Meningkatnya penerapan TIK dalam pembelajaran
    Ik: persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam pembelajaran
    - Terpenuhinya smart class room (membentuk smart classroom di 1 lembaga)
      Ik: Jumlah sekolah yang dijadikan piloting smart classroom
- Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah
  Ik: persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu
  - Meningkatnya tenaga pendidik yang memahami kurikulum di sekolah
    Ik: persentase guru yang memahami kurikulum
    - Terpenuhinya kebutuhan guru yang memahami kurikulum
      Ik: Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum
- Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional
  Ik: Persentase sekolah yang dikelola dengan baik
  - Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengelolaan sekolah
    Ik: Persentase tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berkompeten
    - Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengelolaan sekolah
      Ik: Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tercukupi
- Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional
  Ik: Persentase sekolah yang pembiayaan nya terpenuhi
  - Meningkatnya operasional sekolah untuk kegiatan belajar mengajar
    Ik: persentase sekolah yang terpenuhi pembiayaan proses belajar mengajar
    - Terpenuhinya pembiayaan operasional sekolah
      Ik: Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasional
    - Terpenuhinya wajib belajar 9 tahun
      Ik: Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar
    - Terpenuhi pembiayaan siswa kurang mampu
      Ik: Jumlah siswa kurang mampu
- Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan
  IK: Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi
  - Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik
    Ik: Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi
    - Terpenuhinya pelatihan Program Profesi Guru
      Ik: Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan Program Profesi Guru
    - Terpenuhinya guru yang berkualifikasi S2 (beasiswa guru S2)
      Ik: jumlah guru yang mendapatkan beasiswa S2
- Meningkatnya pengadaan sarana dan prasaran sesuai standart Nasional
  IK: persentase sarpras sekolah yang terpenuhi standar ruang kelas dan dalam kondisi baik
  - Meningkatnya ruang kelas sekolah yang baik
    Ik: persentase ruang kelas yang baik
    - Terlaksananya rehab ruang kelas
      Ik: Jumlah Ruang kelas yang di rehab
- Meningkatnya keberlanjutan pendidikan penduduk kurang mampu
  Ik: Persentase pendidikan penduduk kurang mampu ke jenjang lebih tinggi
  - Meningkatnya pendidikan penduduk kurang mampu minimal D3
    Ik: Jumlah pendidikan penduduk kurang mampu berkualifikasi minimal D3
    - Terpenuhinya penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa
      Ik: Jumlah penduduk kurang mampu yang menerima bantuan beasiswa mahasiswa

next slide pohon kinerja setiap sasaran

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
												2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah		
												Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
Terwujudnya kualitas pendidikan yang berstandar mutu dan berkelanjutan berbasis Teknologi	Persentase pencapaian menuju Standart Nasional Pendidikan (SNP)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai sakip perangkat daerah	**1**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
				1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**321.442.652.241**		**278.077.536.522**		**340.162.887.205**		**342.209.605.125**		**1.281.892.681.093**	
				1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	**Skor**	**A Skor**	**199.816.763.917**	**A Skor**	**205.213.092.252**	**A Skor**	**202.345.219.300**	**A Skor**	**202.345.219.300**	**A Skor**	**809.720.294.769**	
				1	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	**%**	**100%**	**6.175.801.107**	**100**	**7.678.390.464**	**100**	**7.925.625.000**	**100**	**7.925.625.000**	**100**	**29.705.441.571**	
		Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	persentase siswa yang memenuhi passing grade	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6 laporan	6.175.801.107	6 laporan	7.678.390.464	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	29.705.441.571	
				1	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	**%**	**100%**	**186.058.357.958**	**100%**	**189.482.568.348**	**100%**	**186.278.180.000**	**100%**	**186.278.180.000**	**100%**	**748.097.286.306**	
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1540	186.058.357.958	1549	189.482.568.348	1549	186.278.180.000	1549	186.278.180.000	1549	748.097.286.306	
		Meningkatnya implementasi	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai	**1**	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan dokumen administrasi	**%**	**100%**	**6.398.798.452**	**100%**	**7.372.908.340**	**100%**	**6.412.189.200**	**100%**	**6.412.189.200**	**100%**	**26.596.085.192**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
		kurikulum di sekolah	standar mutu							umum												
		Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	Persentase sekolah yang dikelola dengan baik	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	6.122.093.152	37	7.091.958.340	37	6.131.239.200	37	6.131.239.200	37	25.476.529.892	
				1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	276.705.300	148	280.950.000	148	280.950.000	148	280.950.000	148	1.119.555.300	
		Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	1	01	01	2.07	10														
				1	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	**%**	**100%**	**537.906.400**	**100%**	**-**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**2.537.906.400**	
				1	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-		1.000.000.000		-		1.000.000.000	
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	537.906.400		-			50	1.000.000.000	50	1.537.906.400	
				1	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	**%**	**100%**	**645.900.000**	**100%**	**679.225.100**	**100%**	**729.225.100**	**100%**	**729.225.100**	**100%**	**2.783.575.300**	
		Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	persentase sarpras sekolah yang terpenuhi standar ruang kelas dan dalam kondisi baik	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	215	146.100.000	216	147.242.800	216	167.242.800	216	167.242.800	216	627.828.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	329.000.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	1.475.834.000	
		Meningkatnya keberlanjutan pendidikan penduduk kurang mampu	Jumlah pendidikan penduduk kurang mampu ke jenjang lebih tinggi	1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	907	170.800.000	206	149.704.300	206	179.704.300	206	179.704.300	206	679.912.900	
				1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**wajib belajar 9 tahun**		**100%**	**119.094.672.764**	**100%**	**67.421.236.524**	**100%**	**129.743.179.643**	**100%**	**131.784.897.563**	**100%**	**448.043.986.494**	
				1	**1**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Prosentase sekolah yang memenuhi SNP**		**100%**	**76.664.784.769**	**100%**	**29.604.852.641**	**100%**	**61.239.558.500**	**100%**	**61.239.558.500**	**100%**	**228.748.754.410**	
				1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	13.476.463.000	16	4.321.694.150	119	32.388.500.000	119	32.388.500.000	303	82.575.157.150	
				1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/Unit	1	36.621.250.000		-	1	-		-		36.621.250.000	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	335.096.670	1	360.480.445	1	465.096.000	1	465.096.000	1	1.625.769.115	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	146.350.000	1	136.576.723	1	172.350.000	1	172.350.000	1	627.626.723	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	133.320.000	1	208.175.500	1	237.320.000	1	237.320.000	1	816.135.500	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	369.531.000	1	285.565.150	1	395.531.000	1	395.531.000	1	1.446.158.150	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.129.000	1	167.915.638	1	224.129.000	1	224.129.000	1	814.302.638	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	359.225.000	1	310.973.000	1	411.225.000	1	411.225.000	1	1.492.648.000	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.493.000	1	128.625.965	1	158.493.000	1	158.493.000	1	604.104.965	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	339.512.000	1	297.487.320	1	391.512.000	1	391.512.000	1	1.420.023.320	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	128.506.000	1	117.946.400	1	154.506.000	1	154.506.000	1	555.464.400	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	149.605.000	1	154.184.250	1	175.605.000	1	175.605.000	1	654.999.250	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	170.952.000	1	212.441.450	1	248.952.000	1	248.952.000	1	881.297.450	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.637.000	1	204.491.885	1	250.637.000	1	250.637.000	1	904.402.885	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	273.839.000	1	280.000.533	1	351.839.000	1	351.839.000	1	1.257.517.533	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.748.000	1	118.396.200	1	151.748.000	1	151.748.000	1	573.640.200	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	365.105.000	1	361.728.250	1	495.105.000	1	495.105.000	1	1.717.043.250	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	206.048.000	1	175.596.200	1	232.048.000	1	232.048.000	1	845.740.200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.951.000	1	120.669.218	1	168.951.000	1	168.951.000	1	627.522.218	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	184.224.000	1	167.888.240	1	236.224.000	1	236.224.000	1	824.560.240	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	371.490.000	1	299.546.000	1	397.490.000	1	397.490.000	1	1.466.016.000	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	303.519.000	1	268.426.113	1	355.519.000	1	355.519.000	1	1.282.983.113	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	141.796.000	1	150.417.800	1	193.796.000	1	193.796.000	1	679.805.800	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.202.000	1	166.271.300	1	194.202.000	1	194.202.000	1	722.877.300	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	157.449.000	1	108.928.495	1	157.449.000	1	157.449.000	1	581.275.495	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	599.577.000	1	579.661.875	1	755.577.000	1	755.577.000	1	2.690.392.875	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	309.448.000	1	296.886.200	1	387.448.000	1	387.448.000	1	1.381.230.200	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	358.790.000	1	407.673.500	1	495.590.000	1	495.590.000	1	1.757.643.500	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.742.000	1	267.111.553	1	310.742.000	1	310.742.000	1	1.069.337.553	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	144.272.000	1	151.727.225	1	170.272.000	1	170.272.000	1	636.543.225	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	308.382.000	1	296.431.395	1	360.382.000	1	360.382.000	1	1.325.577.395	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	137.641.000	1	125.281.715	1	163.641.000	1	163.641.000	1	590.204.715	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	261.752.000	1	247.103.986	1	339.752.000	1	339.752.000	1	1.188.359.986	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.215.000	1	132.349.750	1	153.215.000	1	153.215.000	1	591.994.750	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	139.024.000	1	102.975.600	1	139.024.000	1	139.024.000	1	520.047.600	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	330.056.000	1	250.205.150	1	330.056.000	1	330.056.000	1	1.240.373.150	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	143.959.000	1	152.333.350	1	169.959.000	1	169.959.000	1	636.210.350	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	243.277.000	1	330.011.468	1	373.277.000	1	373.277.000	1	1.319.842.468	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	199.313.000	1	136.464.705	1	199.313.000	1	199.313.000	1	734.403.705	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	376.959.000	1	364.180.863	1	480.959.000	1	480.959.000	1	1.703.057.863	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.158.000	1	135.707.585	1	169.158.000	1	169.158.000	1	591.181.585	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	181.879.000	1	224.678.350	1	259.879.000	1	259.879.000	1	926.315.350	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	301.614.000	1	262.315.983	1	353.614.000	1	353.614.000	1	1.271.157.983	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	342.723.000	1	392.289.950	1	446.723.000	1	446.723.000	1	1.628.458.950	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	406.319.000	1	394.878.770	1	510.319.000	1	510.319.000	1	1.821.835.770	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.388.000	1	202.044.700	1	244.388.000	1	244.388.000	1	909.208.700	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	480.739.000	1	422.377.865	1	558.739.000	1	558.739.000	1	2.020.594.865	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	363.163.000	1	297.710.660	1	415.163.000	1	415.163.000	1	1.491.199.660	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	277.382.000	1	256.967.263	1	329.382.000	1	329.382.000	1	1.193.113.263	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	231.313.000	1	178.486.620	1	257.313.000	1	257.313.000	1	924.425.620	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	321.444.000	1	261.444.983	1	373.444.000	1	373.444.000	1	1.329.776.983	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	160.138.000	1	149.302.075	1	186.138.000	1	186.138.000	1	681.716.075	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	166.692.000	1	143.761.800	1	192.692.000	1	192.692.000	1	695.837.800	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.738.000	1	219.139.700	1	258.738.000	1	258.738.000	1	917.353.700	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	162.955.000	1	150.900.750	1	214.955.000	1	214.955.000	1	743.765.750	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.428.000	1	116.238.200	1	151.428.000	1	151.428.000	1	570.522.200	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	152.729.000	1	156.213.850	1	178.729.000	1	178.729.000	1	666.400.850	
				1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	136.482.000	1	178.078.001	1	214.482.000	1	214.482.000	1	743.524.001	
				1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	73	517.986.530		-		-		-		517.986.530	
				1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	124	379.929.561	76	518.730.000	76	545.611.500	76	545.611.500	76	1.989.882.561	
				1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	96	670.290.503	56	768.210.976	56	730.469.000	56	730.469.000	56	2.899.439.479	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.591.295	1	338.580.000	1	338.580.000	1	338.580.000	1	1.361.331.295	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	46.531.000	1	46.530.000	1	46.530.000	1	46.530.000	1	186.121.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	60.677.199	1	60.390.000	1	60.390.000	1	60.390.000	1	241.847.199	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.811.864	1	344.520.000	1	344.520.000	1	344.520.000	1	1.379.371.864	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	126.876.708	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.036.708	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	344.710.090	1	343.530.000	1	343.530.000	1	343.530.000	1	1.375.300.090	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.110.245	1	88.110.000	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.440.245	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	252.650.738	1	251.460.000	1	251.460.000	1	251.460.000	1	1.007.030.738	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	107.647.900	1	97.020.000	1	97.020.000	1	97.020.000	1	398.707.900	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	53.156.734	1	52.470.000	1	52.470.000	1	52.470.000	1	210.566.734	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	83.345.817	1	78.210.000	1	78.210.000	1	78.210.000	1	317.975.817	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.086.856	1	162.360.000	1	162.360.000	1	162.360.000	1	653.166.856	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.290.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	666.340.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	33.120.960	1	34.500.000	1	34.650.000	1	34.650.000	1	136.920.960	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	207.919.745	1	200.970.000	1	200.970.000	1	200.970.000	1	810.829.745	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	160.560.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	650.610.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	143.642.000	1	83.160.000	1	83.160.000	1	83.160.000	1	393.122.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.080.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	286.276.416	1	286.110.000	1	286.110.000	1	286.110.000	1	1.144.606.416	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	310.915.431	1	300.900.000	1	300.960.000	1	300.960.000	1	1.213.735.431	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	188.237.516	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	568.397.516	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.051.623	1	115.830.000	1	115.830.000	1	115.830.000	1	463.541.623	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.820.632	1	116.820.000	1	116.820.000	1	116.820.000	1	467.280.632	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	497.671.875	1	493.020.000	1	493.020.000	1	493.020.000	1	1.976.731.875	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	334.745.734	1	333.630.000	1	333.630.000	1	333.630.000	1	1.335.635.734	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	472.062.919	1	445.500.000	1	445.500.000	1	445.500.000	1	1.808.562.919	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	124.380.000	1	123.750.000	1	123.750.000	1	123.750.000	1	495.630.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.750.000	1	92.070.000	1	92.070.000	1	92.070.000	1	366.960.000	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	329.473.667	1	323.730.000	1	323.730.000	1	323.730.000	1	1.300.663.667	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	127.073.195	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.233.195	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.280.034	1	322.740.000	1	322.740.000	1	322.740.000	1	1.291.500.034	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.300.414	1	53.460.000	1	53.460.000	1	53.460.000	1	214.680.414	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.096.911	1	158.400.000	1	158.400.000	1	158.400.000	1	641.296.911	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	318.290.001	1	302.940.000	1	302.940.000	1	302.940.000	1	1.227.110.001	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	72.520.411	1	72.270.000	1	72.270.000	1	72.270.000	1	289.330.411	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	314.511.200	1	299.970.000	1	299.970.000	1	299.970.000	1	1.214.421.200	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.658.854	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.468.854	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	432.885.446	1	430.650.000	1	430.650.000	1	430.650.000	1	1.724.835.446	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	80.066.904	1	76.230.000	1	76.230.000	1	76.230.000	1	308.756.904	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	111.434.595	1	105.930.000	1	105.930.000	1	105.930.000	1	429.224.595	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	363.204.373	1	335.610.000	1	335.610.000	1	335.610.000	1	1.370.034.373	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	352.613.252	1	317.790.000	1	317.790.000	1	317.790.000	1	1.305.983.252	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	417.337.234	1	415.800.000	1	415.800.000	1	415.800.000	1	1.664.737.234	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	106.659.814	1	101.970.000	1	101.970.000	1	101.970.000	1	412.569.814	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	513.146.533	1	506.880.000	1	506.880.000	1	506.880.000	1	2.033.786.533	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	338.861.683	1	334.620.000	1	334.620.000	1	334.620.000	1	1.342.721.683	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	306.891.165	1	296.010.000	1	296.010.000	1	296.010.000	1	1.194.921.165	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	167.695.887	1	164.340.000	1	164.340.000	1	164.340.000	1	660.715.887	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	192.060.139	1	192.060.000	1	192.060.000	1	192.060.000	1	768.240.139	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	133.022.241	1	131.670.000	1	131.670.000	1	131.670.000	1	528.032.241	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	161.395.865	1	161.370.000	1	161.370.000	1	161.370.000	1	645.505.865	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	178.344.598	1	177.210.000	1	177.210.000	1	177.210.000	1	709.974.598	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.095.597	1	173.250.000	1	173.250.000	1	173.250.000	1	695.845.597	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.244.199	1	88.110.000	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.574.199	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.130.137	1	52.470.000	1	52.470.000	1	52.470.000	1	211.540.137	
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	76.240.859	1	76.230.000	1	76.230.000	1	76.230.000	1	304.930.859	
				1	**1**	**2**	**2,02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Prosentase sekolah yang memenuhi SNP**		**100%**	**32.111.385.147**	**100%**	**28.352.092.068**	**100%**	**50.333.907.550**	**100%**	**50.333.907.550**	**100%**	**161.131.292.315**	
				1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	19	5.773.360.000	15	4.590.763.000	77	23.307.439.550	77	23.307.439.550	188	56.979.002.100	
				1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/kain seragam	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	13.537.484.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	926.439.941	1	771.088.858	1	1.056.440.000	1	1.056.440.000	1	3.810.408.799	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	806.751.000	1	1.007.728.150	1	1.222.751.000	1	1.222.751.000	1	4.259.981.150	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	607.714.000	1	532.463.100	1	711.714.000	1	711.714.000	1	2.563.605.100	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	753.383.000	1	689.638.950	1	961.383.000	1	961.383.000	1	3.365.787.950	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	580.908.000	1	614.326.505	1	814.908.000	1	814.908.000	1	2.825.050.505	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	712.369.000	1	681.836.545	1	868.369.000	1	868.369.000	1	3.130.943.545	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	719.101.000	1	685.295.650	1	875.101.000	1	875.101.000	1	3.154.598.650	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	543.935.000	1	411.846.760	1	647.935.000	1	647.935.000	1	2.251.651.760	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	814.886.000	1	638.529.255	1	918.886.000	1	918.886.000	1	3.291.187.255	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	832.342.000	1	855.919.545	1	1.092.342.000	1	1.092.342.000	1	3.872.945.545	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	733.300.000	1	599.169.867	1	863.300.000	1	863.300.000	1	3.059.069.867	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	662.016.000	1	697.774.350	1	896.016.000	1	896.016.000	1	3.151.822.350	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	606.371.000	1	575.359.233	1	762.371.000	1	762.371.000	1	2.706.472.233	
				1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	461.863.000	1	415.520.818	1	591.863.000	1	591.863.000	1	2.061.109.818	
				1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	23 Lembaga	442.992.745	23 Lembaga	227.812.475	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	1.149.551.220	
				1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	131	403.411.740	105	582.134.405	105	723.700.000	105	723.700.000	105	2.432.946.145	
				1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	96	418.843.997	96	100.767.202	96	105.805.000	96	105.805.000	96	731.221.199	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.062.971.689	1	923.136.400	1	923.230.000	1	923.230.000	1	3.832.568.089	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.321.075.132	1	930.490.000	1	930.490.000	1	930.490.000	1	4.112.545.132	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	758.011.881	1	677.600.000	1	677.600.000	1	677.600.000	1	2.790.811.881	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.095.204.362	1	986.150.000	1	986.150.000	1	986.150.000	1	4.053.654.362	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	645.513.042	1	532.400.000	1	532.400.000	1	532.400.000	1	2.242.713.042	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	849.400.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	3.154.450.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	965.067.628	1	882.090.000	1	882.090.000	1	882.090.000	1	3.611.337.628	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	659.804.500	1	648.560.000	1	648.560.000	1	648.560.000	1	2.605.484.500	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	605.788.805	1	504.570.000	1	504.570.000	1	504.570.000	1	2.119.498.805	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	684.912.623	1	613.470.000	1	613.470.000	1	613.470.000	1	2.525.322.623	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	787.392.499	1	775.610.000	1	775.610.000	1	775.610.000	1	3.114.222.499	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	857.702.827	1	767.140.000	1	767.140.000	1	767.140.000	1	3.159.122.827	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.183.651.814	1	854.260.000	1	854.260.000	1	854.260.000	1	3.746.431.814	
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	450.529.922	1	425.920.000	1	425.920.000	1	425.920.000	1	1.728.289.922	
				1	**1**	**2**	**2,03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Lembaga PAUD yang terakreditasi**		**100%**	**8.263.808.828**	**100%**	**8.563.920.185**	**100%**	**17.093.722.593**	**100%**	**19.135.440.513**	**100%**	**53.056.892.119**	
				1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-		7.458.282.080		9.500.000.000		16.958.282.080	
				1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		316.089.480		319.425.865		319.425.865		319.425.865		1.274.367.075	
				1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1000	3.195.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	13.995.000.000	
				1	01	02	2.0	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan	163	4.752.719.348	163	1.137.254.320	163	2.208.774.648	163	2.208.774.648	163	10.307.522.96	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
							3			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen												
									Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	10.521.720.000	
				1	**1**	**2**	**2,04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi**		**100%**	**2.054.694.020**	**100%**	**1.205.271.630**	**100%**	**1.380.891.000**	**100%**	**1.380.891.000**	**100%**	**6.326.647.650**	
				1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Orang	175	918.689.600	175	900.371.630	175	964.624.000	175	964.624.000	175	3.748.309.230	
				1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		150.561.670		-		-		-		150.561.670	
				1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	7	985.442.750	7	-	7	111.367.000	7	111.367.000	7	1.208.176.750	
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			7	304.900.000	7	304.900.000	7	304.900.000	7	914.700.000	
				1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP**		**100%**	**572.110.560**	**100%**	**3.480.307.746**	**100%**	**5.319.203.262**	**100%**	**5.324.203.262**	**100%**	**14.695.824.830**	
				1	**1**	**3**	**2,01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**8 standar pendidikan pada kualitas standard proses dan penilaian pendidikan**		**100%**	**572.110.560**	**100%**	**2.885.323.588**	**100%**	**4.438.648.262**	**100%**	**4.443.648.262**	**100%**	**12.339.730.672**	
				1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-		1.244.648.568		1.832.547.853		1.837.547.853		4.914.744.274	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	-	-		924.010.610		1.488.221.610		1.488.221.610		3.900.453.830	
				1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan LokalPendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang		572.110.560		716.664.410		1.117.878.799		1.117.878.799		3.524.532.568	
				1	**1**	**3**	**2,02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Prosentase sekolah yang memenuhi SNP**		**100%**	**-**	**100%**	**594.984.158**	**100%**	**880.555.000**	**100%**	**880.555.000**	**100%**	**2.356.094.158**	
				1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-		594.984.158		880.555.000		880.555.000		2.356.094.158	
				1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi**		**65%**	**1.959.105.000**	**65%**	**1.658.000.000**	**66%**	**2.450.385.000**	**67%**	**2.450.385.000**	**60%**	**8.517.875.000**	
				1	**1**	**4**	**2,01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi**		**100%**	**1.959.105.000**	**100%**	**1.658.000.000**	**100%**	**2.450.385.000**	**100%**	**2.450.385.000**	**100%**	**8.517.875.000**	
				1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	6	1.622.500.000	6	1.292.000.000	6	1.541.925.000	6	1.541.925.000	6	5.998.350.000	
				1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetara	Laporan	2	336.605.000	2	366.000.000	2	908.460.000	2	908.460.000	2	2.519.525.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
										an												